



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 22 (dua puluh dua)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.15 wib s.d 16.45 wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Membahas evaluasi dan perencanaan program/kegiatan bidang penataan ruang dan pertanahan..
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Deputi III BPN beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah membahas evaluasi dan perencanaan program/kegiatan bidang penataan ruang dan pertanahan.
3. Ketua mempersilakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Deputi III Badan Pertanahan Nasional untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk berupaya meningkatkan daya serapnya pada TA 2010 dengan melakukan perencanaan/pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat, mengingat rendahnya daya serap Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada APBN 2009, sebesar Rp 298 Miliar atau sebesar 85.41% dari total APBN TA 2009 sebesar Rp 349 Miliar.

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang untuk mengevaluasi terjadinya pemblokiran dana sebesar Rp 36 Miliar pada TA 2009, agar tidak terulang pada Tahun Anggaran Berikutnya.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mempercepat dan mengambil langkah terobosan penyelesaian RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007, sampai dengan akhir tahun 2010.
4. Komisi V DPR RI mendukung Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum terkait program pengembangan wilayah dan perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN) termasuk KAPET, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan.
5. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan umum agar selektif dalam menyusun program, sehingga program yang dibuat menjadi sebuah solusi yang diperlukan semua pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk untuk keterpaduan program infrastruktur ke-PU-an.
6. Komisi V DPR RI mengapresiasi program-program yang disusun oleh BPN, antara lain pembangunan peta pertanahan dan kegiatan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Selanjutnya Komisi V meminta BPN agar hasil capaian-capaian program/ kegiatan tersebut dapat disampaikan/ dikoordinasikan dengan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk keperluan persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
7. Terhadap usulan penambahan anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp 135 Milyar, Komisi V DPR RI mendukung Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pada APBN-P 2010 dalam rangka mengejar target/ program yang diamanatkan Undang-Undang.

Catatan:

Komisi V DPR RI perlu mengagendakan rapat konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, serta para Gubernur terkait (7 provinsi), berkenaan dengan lambannya penyelesaian Perda RTRW Provinsi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 16 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

